

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan Jakarta ke depan adalah sektor industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkontribusi penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan jangka panjang dan menengah DKI Jakarta, utamanya dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat Jakarta yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing. Tugas utama yang diemban oleh dinas adalah memperkuat perekonomian DKI Jakarta melalui penciptaan KUKM-KUKM baru berbasis wilayah agar dapat mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan roda perekonomian wilayah, mengurangi angka kejahatan dan berperan langsung dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemampuan wilayah dan sumber daya lokal.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, pasal 1, butir 5). Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam kegiatan pencairan dana atau anggaran pastinya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Perbendaharaan negara adalah segala sesuatu yang mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan negara, termasuk investasi dan asset yang dipisahkan, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam APBN dan APBD berdasarkan undang – undang perbendaharaan negara no.1 tahun 2004.

Salah satu mekanisme pembayaran biaya yang dibebankan APBN adalah Uang Persediaan (UP). UP ini merupakan uang muka kerja yang akan di catat sebagai beban untuk mendanai operasional sehari – hari pada instansi tersebut.

Pengelolaan anggaran negara juga mengacu pada satuan kerja (Satker) yaitu kuasa pengguna anggaran atau barang. Satker dituntut untuk bisa menyusun rencana kerja secara jelas dan juga menyusun anggaran secara jelas, yang nanti pada akhirnya mempunyai tujuan untuk menghasilkan layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, menarik kiranya masalah terkait pembayaran atas suatu transaksi belanja ini dikaji lebih mendalam serta dijadikan topik penulisan Laporan Tugas Akhir. Masalah ini dikatakan menarik dikarenakan dalam melakukan pembayaran atas suatu transaksi belanja terdapat sebuah alur verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran ke pihak penyedia, dan juga dalam proses pembayaran ke pihak penyedia dapat melalui 2 (dua) sistem. Maka dari itu, pengkajian atas masalah pembayaran atas suatu transaksi belanja ini, penulis akan memfokuskan pada prosedurnya, dimana dalam suatu prosedur juga tidak lepas dari sistem pengendalian internal (SPI), karena di dalam suatu prosedur yang telah dibuat untuk menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas terdapat unsur pengendalian internal untuk mendukung kelancaran prosedur tersebut. Sehubungan dengan hal itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menjadikan topik ini dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta”**.

I.2 Tujuan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini berisi penjelasan hasil kegiatan berdasarkan pengalaman penulis setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Subbagian Keuangan Dinas PPKUKM DKI Jakarta, dengan mengaitkan pada teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. Penjelasan hasil kegiatan ini mengenai Prosedur Pembayaran Belanja. Berikut beberapa tujuan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagian yang terkait dalam prosedur pencairan dana ganti uang kas bendahara pengeluaran pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
- b. Untuk memahami ketentuan dokumen pertanggungjawaban belanja
- c. Untuk mengetahui dokumen yang terkait dalam prosedur pencairan dana

ganti uang kas bendahara pengeluaran pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.

- d. Untuk mengetahui mekanisme dan sistem pembayaran pencairan dana ganti uang pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
- e. Untuk mengetahui prosedur pencairan dana ganti uang pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
- f. Untuk memahami diagram alir prosedur pencairan dana ganti uang kas bendahara pengeluaran pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta.

I.3 Manfaat Tugas Akhir

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan penulis diantaranya :

1. Secara Teoritis

Laporan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan, serta informasi yang dapat direlasikan dengan teori pada mata kuliah yang didapatkan di bangku perkuliahan, dimana memiliki kaitan pembahasan serta materi dalam prosedur pembayaran belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD dan Sistem Pengendalian Internal pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta selaku SKPD.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan mengenai prosedur pembayaran belanja yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait yaitu Dinas PPKUKM DKI Jakarta dan untuk membandingkan teori yang telah didapat selama perkuliahan dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi dalam lingkungan instansi pemerintahan.

b. Bagi Universitas

Sebagai acuan atau referensi dalam penulisan laporan atau penelitian khususnya untuk mahasiswa/i Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

c. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi kepada para pembaca mengenai prosedur

pencairan dana ganti uang kas sebagai wujud pelaksanaan APBD dan Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM DKI Jakarta.